



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 182/PMK.07/2013

TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008, TAHUN ANGGARAN 2009, TAHUN ANGGARAN 2010, DAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOP DN adalah sebesar Rp8.088.350.450,00 (delapan miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp860.185.379.766,00 (delapan ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Rincian alokasi Kurang Bayar DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Alokasi Lebih Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOP DN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp69.073.385.699,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. Alokasi Lebih Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOP DN adalah sebesar Rp3.418.856.852,00 (tiga miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah); dan
 - b. Alokasi Lebih Bayar DBH PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp65.654.528.847,00 (enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Rincian alokasi Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sekaligus pada lambat pada bulan Desember 2014.
- (2) Alokasi Lebih Bayar DBH PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperhitungkan dengan alokasi DBH Pajak yang sejenis atau DBH lainnya secara sekaligus pada Tahun Anggaran 2014 dan/atau secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyaluran alokasi Kurang Bayar dan penghitungan Lebih Bayar DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asy



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008, TAHUN ANGGARAN 2009, TAHUN ANGGARAN 2010, DAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 meliputi:

- a. Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010;
- b. Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2011; dan
- c. Alokasi Lebih Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

- (1) Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp9.622.263.584,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (2) Rincian alokasi Kurang Bayar DBH PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Alokasi Kurang Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp868.273.730.216,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus enam belas rupiah), terdiri atas:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1468

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO
NIP 195904201984021001

13/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182 /PMK.07/2013
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI
HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008,
TAHUN ANGGARAN 2009, TAHUN ANGGARAN 2010, DAN
TAHUN ANGGARAN 2011

ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN PASAL 25/29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
TAHUN ANGGARAN 2008, TAHUN ANGGARAN 2009, DAN TAHUN ANGGARAN 2010

(dalam rupiah)

DAERAH	WPOPDN	PASAL 21	JUMLAH
Provinsi DKI Jakarta	9.622.263.584	-	9.622.263.584
Total	9.622.263.584	-	9.622.263.584

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

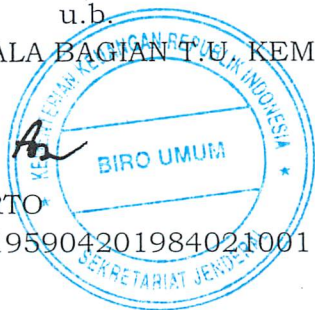
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 182 /PMK.07/2013
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN
ANGGARAN 2008, TAHUN ANGGARAN 2009,
TAHUN ANGGARAN 2010, DAN TAHUN
-ANGGARAN 2011

- 1 -

**ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 25/29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI (WPOPDN) TAHUN ANGGARAN 2011**

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	WPOPDN	Pasal 21	Total
II	Provinsi Sumatera Utara	-	13.319.502.157	13.319.502.157
1	Kab. Asahan	24.135.392	545.757.385	569.892.777
2	Kab. Dairi	-	15.151.337	15.151.337
3	Kab. Deli Serdang	-	1.003.750.590	1.003.750.590
6	Kab. Langkat	-	1.207.676.191	1.207.676.191
7	Kab. Mandailing Natal	-	512.073.349	512.073.349
8	Kab. Nias	-	243.411.953	243.411.953
9	Kab. Simalungun	82.683.004	1.053.648.485	1.136.331.489
10	Kab. Tapanuli Selatan	-	723.134.402	723.134.402
11	Kab. Tapanuli Tengah	-	390.030.357	390.030.357
12	Kab. Tapanuli Utara	-	295.981.675	295.981.675
13	Kab. Toba Samosir	-	405.308.078	405.308.078
14	Kota Binjai	-	664.919.631	664.919.631
15	Kota Medan	-	5.124.834.218	5.124.834.218
16	Kota Pematang Siantar	275.467.756	2.309.846.057	2.585.313.813
17	Kota Sibolga	-	462.548.991	462.548.991
18	Kota Tanjung Balai	17.898.739	259.980.975	277.879.714
19	Kota Tebing Tinggi	-	464.495.821	464.495.821
20	Kota Padang Sidempuan	-	768.925.302	768.925.302
21	Kab. Pakpak Bharat	-	141.255.979	141.255.979
22	Kab. Nias Selatan	-	256.997.153	256.997.153
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	264.005.210	264.005.210
24	Kab. Serdang Berdagai	-	910.176.676	910.176.676
25	Kab. Samosir	-	228.855.592	228.855.592
26	Kab. Batu Bara	2.030.774	501.451.811	503.482.585
27	Kab. Padang Lawas Utara	-	373.459.395	373.459.395
28	Kab. Padang Lawas	-	382.671.042	382.671.042
31	Kab. Nias Utara	-	250.489.539	250.489.539
32	Kab. Nias Barat	-	233.658.524	233.658.524
33	Kota Gunungsitoli	-	352.616.476	352.616.476
III	Provinsi Sumatera Barat	-	7.220.088.906	7.220.088.906
1	Kab. Limapuluh Kota	-	369.309.545	369.309.545
2	Kab. Agam	-	573.906.587	573.906.587
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	219.851.610	219.851.610
4	Kab. Padang Pariaman	-	401.476.851	401.476.851
5	Kab. Pasaman	-	334.708.548	334.708.548
6	Kab. Pesisir Selatan	-	418.030.790	418.030.790
7	Kab. Sijunjung	-	275.801.475	275.801.475
8	Kab. Solok	-	310.711.883	310.711.883
9	Kab. Tanah Datar	-	440.693.724	440.693.724
10	Kota Bukit Tinggi	-	686.500.760	686.500.760

SA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11	Kota Padang Panjang	-	295.844.761	295.844.761
12	Kota Padang	-	4.064.972.812	4.064.972.812
13	Kota Payakumbuh	-	373.402.369	373.402.369
14	Kota Sawahlunto	-	278.527.157	278.527.157
15	Kota Solok	-	298.543.964	298.543.964
16	Kota Pariaman	-	481.289.559	481.289.559
17	Kab. Pasaman Barat	-	456.965.390	456.965.390
18	Kab. Dharmasraya	-	286.129.486	286.129.486
19	Kab. Solok Selatan	-	263.466.087	263.466.087
IV	Provinsi Riau	819.530.846	7.568.578.370	8.388.109.216
1	Kab. Bengkalis	71.757.869	1.836.836.803	1.908.594.672
2	Kab. Indragiri Hilir	50.860.791	816.123.061	866.983.852
3	Kab. Indragiri Hulu	68.581.254	776.628.364	845.209.618
4	Kab. Kampar	31.141.488	583.057.020	614.198.508
5	Kab. Kuantan Singingi	84.061.846	657.737.147	741.798.993
6	Kab. Pelalawan	26.790.364	399.587.589	426.377.953
7	Kab. Rokan Hilir	230.201.906	304.775.043	534.976.949
8	Kab. Rokan Hulu	31.037.427	421.046.804	452.084.231
9	Kab. Siak	28.059.028	671.658.561	699.717.589
10	Kota Dumai	552.046.019	426.812.196	978.858.215
11	Kota Pekanbaru	-	4.120.764.594	4.120.764.594
12	Kab. Kepulauan Meranti	65.008.976	327.589.674	392.598.650
V	Provinsi Kepulauan Riau	89.896.106	1.739.972.865	1.829.868.971
1	Kab. Bintan	141.222	449.388.640	449.529.862
2	Kab. Natuna	9.087.289	819.002.728	828.090.017
3	Kab. Karimun	-	447.305.282	447.305.282
5	Kota Tanjung Pinang	114.638.999	320.088.730	434.727.729
6	Kab. Lingga	3.705.278	168.062.095	171.767.373
7	Kab. Kepulauan Anambas	7.499.238	3.584.574.427	3.592.073.665
VI	Provinsi Jambi	-	1.050.897.382	1.050.897.382
1	Kab. Batanghari	-	103.043.611	103.043.611
2	Kab. Bungo	-	358.121.945	358.121.945
3	Kab. Kerinci	-	33.162.904	33.162.904
5	Kab. Muaro Jambi	-	169.171.866	169.171.866
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	246.732.508	246.732.508
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	261.459.404	261.459.404
9	Kab. Tebo	-	177.768.854	177.768.854
10	Kota Jambi	-	482.386.388	482.386.388
VII	Provinsi Sumatera Selatan	-	10.281.260.634	10.281.260.634
1	Kab. Lahat	-	1.052.993.832	1.052.993.832
2	Kab. Musi Banyuasin	-	1.028.438.842	1.028.438.842
3	Kab. Musi Rawas	-	640.469.878	640.469.878
4	Kab. Muara Enim	-	733.823.104	733.823.104
5	Kab. Ogan Komering Ilir	737.966	996.151.370	996.889.336
7	Kota Palembang	-	7.966.014.087	7.966.014.087
8	Kota Pagar Alam	-	424.200.600	424.200.600
9	Kota Lubuk Linggau	-	856.594.511	856.594.511

2/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10	Kota Prabumulih	-	567.104.239	567.104.239
11	Kab. Banyuasin	-	622.500.550	622.500.550
12	Kab. Ogan Ilir	-	740.101.296	740.101.296
14	Kab. OKU Selatan	-	128.895.996	128.895.996
15	Kab. Empat Lawang	-	389.708.581	389.708.581
VIII	Provinsi Bangka Belitung	-	1.460.298.684	1.460.298.684
1	Kab. Bangka	-	374.881.016	374.881.016
3	Kota Pangkal Pinang	-	1.664.495.453	1.664.495.453
4	Kab. Bangka Selatan	-	183.190.611	183.190.611
5	Kab. Bangka Tengah	-	310.005.154	310.005.154
6	Kab. Bangka Barat	-	485.941.884	485.941.884
IX	Provinsi Bengkulu	-	3.193.382.586	3.193.382.586
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	388.725.623	388.725.623
2	Kab. Bengkulu Utara	-	449.700.165	449.700.165
3	Kab. Rejang Lebong	-	453.324.366	453.324.366
4	Kota Bengkulu	-	1.840.015.650	1.840.015.650
5	Kab. Kaur	-	255.648.452	255.648.452
6	Kab. Seluma	-	306.364.368	306.364.368
7	Kab. Mukomuko	-	318.496.492	318.496.492
8	Kab. Lebong	-	243.386.655	243.386.655
9	Kab. Kepahiang	-	269.074.786	269.074.786
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	265.337.323	265.337.323
X	Provinsi Lampung	-	12.966.977.341	12.966.977.341
1	Kab. Lampung Barat	-	756.546.728	756.546.728
2	Kab. Lampung Selatan	-	1.261.055.968	1.261.055.968
3	Kab. Lampung Tengah	-	1.868.110.186	1.868.110.186
4	Kab. Lampung Utara	-	1.256.863.638	1.256.863.638
5	Kab. Lampung Timur	-	1.195.780.641	1.195.780.641
6	Kab. Tanggamus	-	707.330.425	707.330.425
7	Kab. Tulang Bawang	-	1.522.969.472	1.522.969.472
8	Kab. Way Kanan	-	950.797.773	950.797.773
9	Kota Bandar Lampung	-	6.433.325.479	6.433.325.479
10	Kota Metro	-	929.129.132	929.129.132
11	Kab. Pesawaran	-	708.131.926	708.131.926
12	Kab. Pringsewu	-	690.302.543	690.302.543
13	Kab. Mesuji	-	532.149.862	532.149.862
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	637.972.242	637.972.242
XI	Provinsi DKI Jakarta	-	202.273.814.834	202.273.814.834
XII	Provinsi Jawa Barat	-	36.133.030.762	36.133.030.762
1	Kab. Bandung	-	3.375.270.067	3.375.270.067
3	Kab. Bogor	-	7.330.626.055	7.330.626.055
4	Kab. Ciamis	-	2.896.192.983	2.896.192.983
5	Kab. Cianjur	-	2.049.276.061	2.049.276.061
6	Kab. Cirebon	-	2.431.127.737	2.431.127.737
7	Kab. Garut	-	2.872.677.763	2.872.677.763
8	Kab. Indramayu	-	542.797.528	542.797.528
9	Kab. Karawang	-	2.478.304.909	2.478.304.909

h3/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10	Kab. Kuningan	-	1.494.642.095	1.494.642.095
11	Kab. Majalengka	-	1.438.496.862	1.438.496.862
12	Kab. Purwakarta	-	2.283.177.012	2.283.177.012
13	Kab. Subang	-	1.311.185.240	1.311.185.240
14	Kab. Sukabumi	-	574.386.379	574.386.379
15	Kab. Sumedang	-	1.645.277.778	1.645.277.778
16	Kab. Tasikmalaya	-	588.016.326	588.016.326
17	Kota Bandung	-	15.684.830.691	15.684.830.691
18	Kota Bekasi	-	6.091.010.330	6.091.010.330
19	Kota Bogor	-	1.455.300.043	1.455.300.043
20	Kota Cirebon	-	2.268.882.720	2.268.882.720
21	Kota Depok	-	4.760.973.187	4.760.973.187
22	Kota Sukabumi	-	583.380.636	583.380.636
23	Kota Cimahi	-	627.108.022	627.108.022
24	Kota Tasikmalaya	-	582.882.200	582.882.200
25	Kota Banjar	-	1.197.266.655	1.197.266.655
26	Kab. Bandung Barat	-	1.045.426.216	1.045.426.216
XIII	Provinsi Banten	-	19.083.685.066	19.083.685.066
1	Kab. Lebak	-	1.364.203.046	1.364.203.046
2	Kab. Pandeglang	-	1.429.455.625	1.429.455.625
3	Kab. Serang	-	3.320.915.727	3.320.915.727
4	Kab. Tangerang	-	2.391.391.788	2.391.391.788
5	Kota Cilegon	-	400.008.474	400.008.474
6	Kota Tangerang	-	16.224.861.629	16.224.861.629
7	Kota Serang	-	1.651.497.836	1.651.497.836
8	Kota Tangerang Selatan	-	1.843.193.473	1.843.193.473
XIV	Provinsi Jawa Tengah	-	28.038.285.201	28.038.285.201
1	Kab. Banjarnegara	-	752.397.759	752.397.759
2	Kab. Banyumas	19.401.317	1.792.034.781	1.811.436.098
3	Kab. Batang	-	458.880.952	458.880.952
4	Kab. Blora	-	820.389.175	820.389.175
5	Kab. Boyolali	12.671	744.852.779	744.865.450
6	Kab. Brebes	-	1.131.072.442	1.131.072.442
8	Kab. Demak	-	1.259.258.681	1.259.258.681
9	Kab. Grobogan	-	746.955.522	746.955.522
10	Kab. Jepara	-	2.413.161.964	2.413.161.964
11	Kab. Karanganyar	-	581.585.060	581.585.060
12	Kab. Kebumen	-	649.737.334	649.737.334
13	Kab. Kendal	-	462.309.785	462.309.785
14	Kab. Klaten	-	2.380.602.490	2.380.602.490
15	Kab. Kudus	1.331.817.782	264.837.971	1.596.655.753
16	Kab. Magelang	-	618.812.161	618.812.161
17	Kab. Pati	-	1.073.391.950	1.073.391.950
18	Kab. Pekalongan	4.713.510	713.294.658	718.008.168
19	Kab. Pemalang	4.676.538	913.549.272	918.225.810
20	Kab. Purbalingga	-	670.725.465	670.725.465
21	Kab. Purworejo	-	369.176.563	369.176.563

AK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

22	Kab. Rembang	-	762.641.554	762.641.554
23	Kab. Semarang	-	890.795.528	890.795.528
24	Kab. Sragen	-	561.505.971	561.505.971
26	Kab. Tegal	-	1.289.480.329	1.289.480.329
27	Kab. Temanggung	-	504.968.509	504.968.509
29	Kab. Wonosobo	-	503.855.865	503.855.865
30	Kota Magelang	5.737.153	573.177.607	578.914.760
31	Kota Pekalongan	64.068.595	1.076.363.430	1.140.432.025
32	Kota Salatiga	-	525.261.501	525.261.501
33	Kota Semarang	-	13.722.030.070	13.722.030.070
34	Kota Surakarta	-	979.396.662	979.396.662
35	Kota Tegal	-	1.258.133.755	1.258.133.755
XV	Provinsi DI Yogyakarta	-	5.559.699.516	5.559.699.516
1	Kab. Bantul	-	369.194.738	369.194.738
2	Kab. Gunung Kidul	-	1.392.908.187	1.392.908.187
3	Kab. Kulon Progo	-	1.699.698.426	1.699.698.426
4	Kab. Sleman	-	2.004.167.991	2.004.167.991
5	Kota Yogyakarta	-	2.873.579.931	2.873.579.931
XVI	Provinsi Jawa Timur	-	45.597.167.851	45.597.167.851
1	Kab. Bangkalan	-	835.082.431	835.082.431
2	Kab. Banyuwangi	-	2.330.975.830	2.330.975.830
3	Kab. Blitar	-	1.428.860.070	1.428.860.070
4	Kab. Bojonegoro	-	2.230.956.322	2.230.956.322
5	Kab. Bondowoso	-	1.338.575.370	1.338.575.370
6	Kab. Gresik	2.839.233	1.296.575.565	1.299.414.798
7	Kab. Jember	-	2.898.157.874	2.898.157.874
8	Kab. Jombang	-	794.454.329	794.454.329
9	Kab. Kediri	30.080.191	2.285.490.459	2.315.570.650
10	Kab. Lamongan	-	1.964.814.573	1.964.814.573
11	Kab. Lumajang	-	1.210.520.753	1.210.520.753
12	Kab. Madiun	-	1.627.081.115	1.627.081.115
13	Kab. Magetan	-	922.996.646	922.996.646
14	Kab. Malang	-	2.862.591.779	2.862.591.779
15	Kab. Mojokerto	-	870.941.262	870.941.262
16	Kab. Nganjuk	32.604.169	1.993.583.473	2.026.187.642
17	Kab. Ngawi	-	888.437.551	888.437.551
18	Kab. Pacitan	-	1.450.169.478	1.450.169.478
19	Kab. Pamekasan	-	1.272.710.249	1.272.710.249
20	Kab. Pasuruan	-	2.095.881.279	2.095.881.279
21	Kab. Ponorogo	-	1.892.115.737	1.892.115.737
22	Kab. Probolinggo	-	2.227.222.632	2.227.222.632
23	Kab. Sampang	-	807.242.989	807.242.989
24	Kab. Sidoarjo	1.316.100.912	3.584.608.948	4.900.709.860
25	Kab. Situbondo	-	1.341.422.003	1.341.422.003
26	Kab. Sumenep	-	1.660.558.678	1.660.558.678
27	Kab. Trenggalek	-	1.131.937.438	1.131.937.438
28	Kab. Tuban	-	2.499.157.223	2.499.157.223

12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

29	Kab. Tulungagung	85.163.038	1.433.220.073	1.518.383.111
30	Kota Blitar	-	1.063.781.512	1.063.781.512
31	Kota Kediri	25.115.576	2.952.838.864	2.977.954.440
32	Kota Madiun	-	2.493.934.761	2.493.934.761
33	Kota Malang	17.234.191	5.475.051.729	5.492.285.920
34	Kota Mojokerto	-	696.605.337	696.605.337
35	Kota Pasuruan	-	1.252.053.666	1.252.053.666
36	Kota Probolinggo	-	1.067.760.929	1.067.760.929
37	Kota Surabaya	-	2.075.447.720	2.075.447.720
38	Kota Batu	-	632.797.822	632.797.822
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	-	3.829.291.648	3.829.291.648
1	Kab. Bengkayang	1.141.547	248.557.776	249.699.323
2	Kab. Landak	-	325.376.536	325.376.536
3	Kab. Kapuas Hulu	-	4.312.239	4.312.239
4	Kab. Ketapang	20.456.516	619.966.490	640.423.006
5	Kab. Pontianak	-	124.995.527	124.995.527
6	Kab. Sambas	6.139.653	276.204.396	282.344.049
7	Kab. Sanggau	-	666.767.474	666.767.474
9	Kota Pontianak	29.876.615	2.190.414.901	2.220.291.516
10	Kota Singkawang	20.512.122	306.579.495	327.091.617
11	Kab. Sekadau	-	276.366.062	276.366.062
12	Kab. Melawi	-	49.967.830	49.967.830
13	Kab. Kayong Utara	-	163.635.104	163.635.104
14	Kab. Kubu Raya	678.529	487.481.714	488.160.243
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	5.659.278	6.538.795.608	6.544.454.886
1	Kab. Barito Selatan	-	685.755.259	685.755.259
2	Kab. Barito Utara	-	853.904.349	853.904.349
3	Kab. Kapuas	-	387.318.290	387.318.290
4	Kab. Kotawaringin Barat	-	564.711.249	564.711.249
5	Kab. Kotawaringin Timur	56.687.445	1.361.505.747	1.418.193.192
6	Kota Palangkaraya	-	1.571.840.662	1.571.840.662
7	Kab. Barito Timur	-	1.057.765.548	1.057.765.548
8	Kab. Murung Raya	-	1.188.493.623	1.188.493.623
9	Kab. Pulang Pisau	705	311.052.388	311.053.093
10	Kab. Gunung Mas	-	335.066.631	335.066.631
11	Kab. Lamandau	-	247.571.237	247.571.237
12	Kab. Sukamara	-	230.170.602	230.170.602
13	Kab. Katingan	662.274	340.914.236	341.576.510
14	Kab. Seruyan	2.487.571	620.774.513	623.262.084
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	-	9.811.596.520	9.811.596.520
1	Kab. Banjar	855.312	1.068.350.093	1.069.205.405
2	Kab. Barito Kuala	-	642.606.330	642.606.330
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	633.054.016	633.054.016
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	691.973.941	691.973.941
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	432.607.047	432.607.047
6	Kab. Kotabaru	144.504.270	1.520.551.911	1.665.056.181
7	Kab. Tabalong	-	794.719.592	794.719.592

MS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

8	Kab. Tanah Laut	-	1.238.813.746	1.238.813.746
9	Kab. Tapin	-	611.966.666	611.966.666
10	Kota Banjarbaru	16.156.643	1.374.214.139	1.390.370.782
11	Kota Banjarmasin	-	4.123.808.170	4.123.808.170
12	Kab. Balangan	-	524.700.279	524.700.279
13	Kab. Tanah Bumbu	25.423.040	873.089.586	898.512.626
3	Kab. Kutai Kartanegara	-	948.956.696	948.956.696
4	Kab. Kutai Barat	-	537.561.414	537.561.414
8	Kab. Pasir	6.693.312	86.068.968	92.762.280
9	Kota Balikpapan	31.965.095	1.263.375.046	1.295.340.141
11	Kota Samarinda	-	2.165.388.605	2.165.388.605
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	28.153.708	3.941.465.896	3.969.619.604
1	Kab. Bolaang Mongondow	1.660.065	254.957.926	256.617.991
2	Kab. Minahasa	-	1.160.270.220	1.160.270.220
3	Kab. Sangihe	-	86.235.368	86.235.368
4	Kota Bitung	-	1.038.767.814	1.038.767.814
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	106.604.308	106.872.736
7	Kab. Minahasa Selatan	2.395.465	316.213.099	318.608.564
8	Kota Tomohon	2.649.417	92.563.150	95.212.567
9	Kab. Minahasa Utara	-	1.455.849.727	1.455.849.727
10	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.043.804	172.225.963	173.269.767
11	Kota Kotamobagu	5.893.244	447.139.999	453.033.243
12	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	100.431.609	100.431.609
13	Kab. Minahasa Tenggara	1.112.994	251.068.727	252.181.721
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	966.282	464.304.121	465.270.403
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	977.924	177.102.638	178.080.562
XXII	Provinsi Gorontalo	24.669.948	695.493.666	720.163.614
1	Kab. Boalemo	2.094.090	88.199.186	90.293.276
2	Kab. Gorontalo	3.465.937	231.811.560	235.277.497
3	Kota Gorontalo	24.541.063	419.769.872	444.310.935
4	Kab. Pohuwato	2.936.315	96.067.792	99.004.107
5	Kab. Bone Bolango	1.959.360	123.981.481	125.940.841
6	Kab. Gorontalo Utara	2.008.159	83.410.609	85.418.768
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	-	1.596.723.517	1.596.723.517
1	Kab. Banggai	25.555.886	589.557.378	615.113.264
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	205.872.407	205.872.407
3	Kab. Buol	-	143.088.587	143.088.587
4	Kab. Tolitoli	-	164.308.175	164.308.175
5	Kab. Donggala	-	38.583.330	38.583.330
6	Kab. Morowali	-	357.843.625	357.843.625
7	Kab. Poso	-	486.626.007	486.626.007
8	Kota Palu	-	17.866.295	17.866.295
9	Kab. Parigi Moutong	-	43.488.310	43.488.310
10	Kab. Tojo Una Una	-	266.058.061	266.058.061
11	Kab. Sigi	-	56.237.214	56.237.214
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	-	6.811.427.045	6.811.427.045
1	Kab. Bantaeng	-	140.196.760	140.264.723

15/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

2	Kab. Barru	-	176.516.338	176.516.338
3	Kab. Bone	-	383.058.451	383.058.451
4	Kab. Bulukumba	-	440.242.068	440.242.068
5	Kab. Enrekang	-	171.741.623	171.741.623
6	Kab. Gowa	5.574.954	166.699.681	172.274.635
7	Kab. Jenepono	-	148.012.566	148.012.566
8	Kab. Luwu	-	175.796.077	175.796.077
9	Kab. Luwu Utara	-	209.040.752	209.040.752
12	Kab. Pinrang	3.058.030	198.861.900	201.919.930
13	Kab. Kepulauan Selayar	-	211.659.742	211.659.742
14	Kab. Sidenreng Rappang	3.656.591	204.780.401	208.436.992
15	Kab. Sinjai	-	266.776.933	266.776.933
16	Kab. Soppeng	-	232.802.194	232.802.194
17	Kab. Takalar	-	145.943.595	145.943.595
18	Kab. Tana Toraja	-	243.606.749	243.606.749
19	Kab. Wajo	-	280.597.741	280.597.741
20	Kota Parepare	21.629.827	242.058.434	263.688.261
21	Kota Makassar	-	4.890.037.609	4.890.037.609
22	Kota Palopo	3.083.962	283.064.540	286.148.502
23	Kab. Luwu Timur	-	1.092.044.039	1.092.044.039
24	Kab. Toraja Utara	-	161.088.716	161.088.716
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	4.344.133.984	4.344.133.984
1	Kab. Buton	-	427.629.858	427.629.858
2	Kab. Konawe	-	444.602.444	444.602.444
3	Kab. Kolaka	6.418.027	828.784.859	835.202.886
4	Kab. Muna	-	482.729.659	482.729.659
5	Kota Kendari	16.687.653	2.055.810.845	2.072.498.498
6	Kota Baubau	-	517.578.749	517.578.749
7	Kab. Konawe Selatan	-	502.554.680	502.554.680
8	Kab. Bombana	-	294.845.735	294.845.735
9	Kab. Wakatobi	-	282.353.206	282.353.206
10	Kab. Kolaka Utara	-	242.295.317	242.295.317
11	Kab. Konawe Utara	-	220.900.310	220.900.310
12	Kab. Buton Utara	-	193.009.635	193.009.635
XXVII	Provinsi Bali	562.531.658	10.608.135.008	11.170.666.666
1	Kab. Badung	139.087.845	3.771.675.251	3.910.763.096
2	Kab. Bangli	32.352.138	608.146.709	640.498.847
3	Kab. Buleleng	-	1.924.368.323	1.924.368.323
4	Kab. Gianyar	119.458.024	844.321.145	963.779.169
5	Kab. Jembrana	-	1.022.264.247	1.022.264.247
6	Kab. Karangasem	34.349.385	745.085.344	779.434.729
7	Kab. Klungkung	35.682.295	645.913.050	681.595.345
8	Kab. Tabanan	-	1.265.781.349	1.265.781.349
9	Kota Denpasar	565.958.987	5.001.555.904	5.567.514.891
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	54.163.967	3.078.169.991	3.132.333.958
1	Kab. Bima	2.829.606	167.931.176	170.760.782
2	Kab. Dompu	4.249.679	236.447.333	240.697.012

MS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

3	Kab. Lombok Barat	2.109.812	306.795.020	308.904.832
4	Kab. Lombok Tengah	2.111.791	473.374.355	475.486.146
5	Kab. Lombok Timur	2.200.154	576.063.384	578.263.538
6	Kab. Sumbawa	2.953.480	193.212.387	196.165.867
7	Kota Mataram	53.370.759	1.367.483.309	1.420.854.068
8	Kota Bima	6.056.392	395.920.157	401.976.549
9	Kab. Sumbawa Barat	3.073.276	657.431.243	660.504.519
10	Kab. Lombok Utara	2.291.003	242.596.621	244.887.624
3	Kab. Ende	-	187.745.602	187.745.602
7	Kab. Manggarai	-	65.935.333	65.935.333
8	Kab. Ngada	-	77.455.343	77.455.343
10	Kab. Sumba Barat	-	137.833.020	137.833.020
11	Kab. Sumba Timur	-	187.655.995	187.655.995
16	Kab. Manggarai Barat	-	40.746.176	40.746.176
17	Kab. Nagekeo	-	47.806.983	47.806.983
18	Kab. Sumba Tengah	-	35.823.753	35.823.753
19	Kab. Sumba Barat Daya	-	10.410.615	10.410.615
20	Kab. Manggarai Timur	-	1.196.238	1.196.238
XXX	Provinsi Maluku	-	3.152.161.993	3.152.161.993
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	128.700.568	128.700.568
2	Kab. Maluku Tengah	-	420.221.966	420.221.966
3	Kab. Maluku Tenggara	-	383.469.672	383.469.672
4	Kab. Buru	-	158.309.560	158.309.560
5	Kota Ambon	-	2.302.769.364	2.302.769.364
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	234.396.661	234.396.661
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	187.123.374	187.123.374
8	Kab. Kepulauan Aru	-	189.190.200	189.190.200
9	Kota Tual	-	149.652.975	149.652.975
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	340.789.983	340.789.983
11	Kab. Buru Selatan	-	233.618.667	233.618.667
XXXI	Provinsi Maluku Utara	60.001.879	549.158.876	609.160.755
1	Kab. Halmahera Tengah	3.155.302	22.257.864	25.413.166
2	Kab. Halmahera Barat	6.648.974	74.243.909	80.892.883
3	Kota Ternate	40.510.572	5.940.918	46.451.490
4	Kab. Halmahera Timur	6.642.123	89.119.120	95.761.243
5	Kota Tidore Kepulauan	3.695.246	12.219.874	15.915.120
6	Kab. Kepulauan Sula	3.622.359	22.106.665	25.729.024
7	Kab. Halmahera Selatan	5.469.645	20.999.282	26.468.927
8	Kab. Halmahera Utara	16.893.540	535.531.822	552.425.362
9	Kab. Pulau Morotai	3.365.057	41.318.860	44.683.917
XXXII	Provinsi Papua	-	4.811.687.147	4.811.687.147
1	Kab. Biak Numfor	-	390.702.493	390.702.493
2	Kab. Jayapura	-	221.140.884	221.140.884
3	Kab. Jayawijaya	-	387.038.967	387.038.967
4	Kab. Merauke	-	373.212.470	373.212.470
5	Kab. Mimika	-	118.082.298	118.082.298
6	Kab. Nabire	-	248.651.731	248.651.731

15/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

7	Kab. Paniai	-	75.244.354	75.244.354
8	Kab. Puncak Jaya	-	154.161.910	154.161.910
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	213.409.229	213.409.229
10	Kota Jayapura	-	2.597.195.100	2.597.195.100
11	Kab. Sarmi	-	133.004.027	133.004.027
12	Kab. Keerom	-	151.160.578	151.160.578
13	Kab. Yahukimo	-	97.110.693	97.110.693
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	208.354.364	208.354.364
15	Kab. Tolikara	-	108.734.032	108.734.032
16	Kab. Boven Digoel	-	296.559.083	296.559.083
17	Kab. Mappi	-	186.477.458	186.477.458
18	Kab. Asmat	-	164.379.164	164.379.164
19	Kab. Waropen	-	99.864.840	99.864.840
20	Kab. Supiori	-	86.391.562	86.391.562
21	Kab. Mamberamo Raya	-	77.686.589	77.686.589
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	95.789.648	95.789.648
23	Kab. Yalimo	-	112.903.919	112.903.919
24	Kab. Lanny Jaya	-	114.561.267	114.561.267
25	Kab. Nduga	-	106.846.902	106.846.902
26	Kab. Puncak	-	151.605.686	151.605.686
27	Kab. Dogiyai	-	97.414.553	97.414.553
28	Kab. Intan Jaya	-	74.949.507	74.949.507
29	Kab. Deiyai	-	74.897.417	74.897.417
XXXIII	Provinsi Papua Barat	69.943.150	1.150.991.962	1.220.935.112
1	Kab. Sorong	3.588.039	-	3.588.039
2	Kab. Manokwari	-	474.512.866	474.512.866
3	Kab. Fak Fak	12.268.652	22.030.218	34.298.870
4	Kota Sorong	12.852.266	-	12.852.266
5	Kab. Sorong Selatan	5.552.817	29.637.257	35.190.074
6	Kab. Raja Ampat	3.223.693	32.244.176	35.467.869
7	Kab. Teluk Bintuni	2.570.942	908.716.134	911.287.076
8	Kab. Teluk Wondama	2.817.983	182.396.480	185.214.463
9	Kab. Kaimana	6.284.725	33.848.936	40.133.661
10	Kab. Tambrauw	2.864.283	46.469.641	49.333.924
11	Kab. Maybrat	2.891.867	46.631.692	49.523.559
	Total Provinsi	1.714.550.540	456.405.875.016	458.120.425.556
	Total Kabupaten/Kota	6.373.799.910	403.779.504.750	410.153.304.660
	Total Nasional	8.088.350.450	860.185.379.766	868.273.730.216

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TUJUH KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182/PMK.07/2013
TENTANG
ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN
2008, TAHUN ANGGARAN 2009, TAHUN
ANGGARAN 2010, DAN TAHUN ANGGARAN 2011

**ALOKASI LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN PASAL 25/29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (WPOPDN)
TAHUN ANGGARAN 2011**

(dalam rupiah penuh)

NO	DAERAH	WPOPDN	Pasal 21	TOTAL
I	Provinsi Aceh	108.568.982	6.433.576.347	6.542.145.329
II	Provinsi Kalimantan Timur	97.577.426	9.941.592.698	10.039.170.124
III	Provinsi Sulawesi Barat	3.774.133	313.524.618	317.298.751
IV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	110.108.280	67.141.807	177.250.087
1	Kab. Aceh Barat	8.696.118	844.511.550	853.207.668
2	Kab. Aceh Besar	5.953.632	856.817.537	862.771.169
3	Kab. Aceh Selatan	3.514.325	239.013.862	242.528.187
4	Kab. Aceh Singkil	2.184.276	388.569.142	390.753.418
5	Kab. Aceh Tengah	3.313.746	190.181.906	193.495.652
6	Kab. Aceh Tenggara	2.245.280	327.107.617	329.352.897
7	Kab. Aceh Timur	2.175.264	92.132.293	94.307.557
8	Kab. Aceh Utara	1.604.506	132.538.320	134.142.826
9	Kab. Bireuen	3.373.083	212.983.151	216.356.234
10	Kab. Pidie	10.161.884	590.501.870	600.663.754
11	Kab. Simeulue	2.755.635	242.845.778	245.601.413
12	Kota Banda Aceh	88.356.638	2.750.544.291	2.838.900.929
13	Kota Sabang	4.578.147	247.302.473	251.880.620
14	Kota Langsa	4.463.037	15.796.913	20.259.950
15	Kota Lhokseumawe	-	134.955.463	134.955.463
16	Kab. Nagan Raya	2.677.135	676.362.966	679.040.101
17	Kab. Aceh Jaya	4.499.142	548.916.279	553.415.421
18	Kab. Aceh Barat Daya	4.005.504	404.894.954	408.900.458
19	Kab. Gayo Lues	2.148.915	108.868.723	111.017.638
20	Kab. Aceh Tamiang	3.008.442	45.739.308	48.747.750
21	Kab. Bener Meriah	2.130.929	155.611.477	157.742.406
22	Kota Subulussalam	2.167.764	285.412.819	287.580.583
23	Kab. Pidie Jaya	2.131.736	155.464.165	157.595.901
24	Kab. Tanah Karo	19.374.246	63.369.203	82.743.449
25	Kab. Labuhan Batu	52.226.990	381.638.036	433.865.026
26	Kab. Labuhan Batu Selatan	14.133.258	181.221.772	195.355.030
27	Kab. Labuhan Batu Utara	17.903.060	40.208.062	58.111.122
28	Kota Batam	-	3.178.690.471	3.178.690.471
29	Kab. Merangin	24.547.385	85.536.146	110.083.531
30	Kab. Sarolangun	17.560.287	5.585.821	23.146.108
31	Kota Sungai Penuh	17.608.034	104.663.734	122.271.768
32	Kab. Ogan Komering Ulu	21.468.099	627.095.248	648.563.347
33	Kab. OKU Timur	8.171.900	69.108.656	77.280.556
34	Kab. Belitung	78.034.726	264.891.006	342.925.732
35	Kab. Belitung Timur	99.274.447	385.865.914	485.140.361
36	Kab. Bekasi	2.076.976.511	11.331.992.845	13.408.969.356
37	Kab. Cilacap	84.934.891	119.982.704	204.917.595
38	Kab. Sukoharjo	56.683.484	547.681.289	604.364.773
39	Kab. Wonogiri	21.760.528	6.594.416	28.354.944
40	Kab. Sintang	35.029.601	40.463.455	75.493.056
41	Kab. Berau	-	775.363.168	775.363.168



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

42	Kab. Bulungan	-	571.700.190	571.700.190
43	Kab. Kutai Timur	35.642.286	6.366.201.435	6.401.843.721
44	Kab. Malinau	-	454.278.242	454.278.242
45	Kab. Nunukan	-	719.296.230	719.296.230
46	Kota Bontang	149.098.537	8.858.600.196	9.007.698.733
47	Kota Tarakan	-	1.576.005.196	1.576.005.196
48	Kab. Penajam Paser Utara	2.040.079	213.533.461	215.573.540
49	Kab. Tana Tidung	3.002.783	374.002.519	377.005.302
50	Kota Manado	-	186.272.886	186.272.886
51	Kab. Maros	9.049.075	21.695.999	30.745.074
52	Kab. Pangkajene Kepulauan	5.489.226	248.323.368	253.812.594
53	Kab. Majene	-	93.961.593	93.961.593
54	Kab. Mamuju	5.674.481	76.371.595	82.046.076
55	Kab. Polewali Mandar	-	125.420.465	125.420.465
56	Kab. Mamasa	176.220	130.903.150	131.079.370
57	Kab. Mamuju Utara	564.528	42.876.094	43.440.622
58	Kab. Alor	5.034.396	24.312.952	29.347.348
59	Kab. Belu	8.664.062	38.137.483	46.801.545
60	Kab. Flores Timur	6.443.201	-	6.443.201
61	Kab. Kupang	2.223.555	66.397.928	68.621.483
62	Kab. Lembata	3.657.020	-	3.657.020
63	Kab. Sikka	40.699.658	-	40.699.658
64	Kab. Timor Tengah Selatan	1.646.032	35.337.705	36.983.737
65	Kab. Timor Tengah Utara	3.371.271	23.857.161	27.228.432
66	Kota Kupang	-	744.866.627	744.866.627
67	Kab. Rote Ndao	2.194.743	38.057.857	40.252.600
68	Kab. Sabu Raijua	2.324.293	11.258.242	13.582.535
Total Provinsi		320.028.821	16.755.835.470	17.075.864.291
Total Kabupaten/Kota		3.098.828.031	48.898.693.377	51.997.521.408
Total Nasional		3.418.856.852	65.654.528.847	69.073.385.699

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

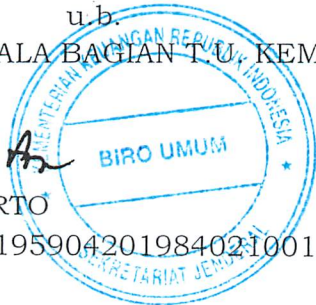
ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u. b.

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001

5/10